



BKPSDM
KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN KINERJA 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Pencapaian sasaran strategis dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran BKPSDM Kota Balikpapan. Laporan kinerja, menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta inovasi yang ada dilingkungan BKPSDM Kota Balikpapan.

Penyusunan Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 serta Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, BKPSDM telah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan manajemen risiko. Dimana atas risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan disiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengatasinya

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi

optimalisasi peran kelembagaan serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BKPSDM Kota Balikpapan secara keseluruhan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala BKPSDM

Kota Balikpapan



Purnomo M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

BKPSDM Kota Balikpapan memperhatikan program prioritas daerah dan isu- isu strategis penunjang urusan pemerintahan dalam lingkup Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan terkini, serta mengacu pada Renstra BKPSDM dalam menyusun sasaran strategis. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan strategis antara Renstra BKPSDM 2021- 2026 dan Renstra 2025-2029. Renstra yang memuat sasaran strategis kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. PK BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan implementasi dari 2 (dua) program prioritas, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia serta 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BKPSDM Kota Balikpapan pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja 2025 yang mengacu pada Renstra BKPSDM 2021-2026 memiliki 2 (dua) sasaran dengan total 3 (tiga) indikator, yaitu 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja tambahan yang terkait NSPK Manajemen ASN. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) target kinerja sasaran strategis memiliki capaian melebihi 100% dan 1 (satu) indikator kinerja NSPK Manajemen ASN dengan capaian indikator dibawah 100%.

Atas dasar Renstra BKPSDM 2025-2029, perjanjian kinerja BKPSDM memiliki 3 (tiga) indikator yang diperjanjikan. 1 (satu) indikator berupa indikator kinerja tujuan tidak mencapai target kinerja 100%, sementara 2 (dua) indikator sasaran memiliki

capaian melebihi 100%.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BKPSDM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	80,19	100,24%	Melebihi Target
			Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74	72,68	98,22%	Tidak Tercapai
1.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP BKPSDM	Persen	88	88,02	100,02%	Melebihi Target

Sumber: BKPSDM 2025

Tabel diatas menjelaskan

1. IP ASN telah melebihi target renstra BKPSDM tahun 2025 pada Renstra BKPSDM 2021- 2026, yaitu 61. Untuk penyesuaian hasil realisasi tahun 2024 dilakukan perubahan target kinerja yaitu menjadi 80. Target terlampaui ketika realisasi yaitu sebesar 80,19 dengan capaian 100,23%.
2. Sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN selain diwakilkan nilai IP ASN sebagai IKU perangkat daerah, juga di wakilkan oleh indeks NSPK manajemen ASN yang menjadi komitmen kepala perangkat daerah. Indeks manajemen ASN tahun 2025 terealisasi 72,68 dan tidak dapat mencapai target kinerja 74. Indikator ini memiliki capaian 98,21%.
3. IKU BKPSDM yang ke dua adalah Nilai SAKIP BKPSDM. Tahun 2025, nilai hasil evaluasi SAKIP BKPSDM adalah 88.

Indikator ini memiliki capaian kinerja 100,02 %.

Tabel 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Perubahan Renstra 2025-2029

No .	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,69	0,68	98,55%	Tidak Mencapai Target
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	80,19	100,23 %	Melebihi Target
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP BKPSDM	Persen	88	88,02	100,02 %	Melebihi Target
1.2	Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan							

Sumber: BKPSDM 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa:

1. Indikator kinerja tujuan BKPSDM 2025, yaitu Indeks Sistem Merit terealisasi 0,68 dari target kinerja 0,69 memiliki capaian kinerja 98,55% atau berpredikat Tidak Tercapai.
2. Indikator kinerja utama meningkatnya profesionalitas ASN diwakilkan oleh indikator indeks profesionalitas ASN (IP ASN). Indikator ini memiliki realisasi sebesar 80,19 dari target kinerja 80,00 dengan capaian 100,23% . Indikator ini memiliki predikat melebihi target.
3. IKU BKPSDM yang ke dua adalah Nilai SAKIP BKPSDM. Tahun 2025, nilai hasil evaluasi SAKIP BKPSDM adalah 88. Indikator ini mencapai target kinerja. Indikator ini memiliki capaian kinerja 100,02 % dengan predikat kinerja melebihi target.

Pada Tahun 2025, BKPSDM mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp.26.604.931.522,00 dan terealisasi sebesar

Rp.22.486.010.310,00. dengan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 84,52%. Alokasi anggaran BKPSDM Kota Balikpapan digunakan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan ditandakan dengan Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan.

Capaian kinerja BKPSDM diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	5
1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.	10
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
1.1. PERENCANAAN STRATEGIS	22
1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	30
1.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	33
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1. LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA	41
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43

3.2.1.	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025	44
3.2.2.	PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	47
3.2.3.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA PERENCANAAN STRATEGIS	53
3.2.4.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN MENGACU PADA SPM/ STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (<i>BENCHMARK KINERJA</i>).....	55
3.2.5.	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	57
3.2.6.	ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN) KINERJA	73
3.2.7.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	87
3.3.	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	97
BAB IV. PENUTUP		102
LAMPIRAN		103

DAFTAR TABEL

TABEL 1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 ATAS	IV
TABEL 2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA 2025-2029	V
TABEL 3. RINCIAN PEGAWAI BKPSDM KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN JABATAN DAN GOLONGAN.....	8
TABEL 4. PEMASALAHAN STRATEGIS BKPSDM KOTA BALIKPAPAN 2021-2026.....	11
TABEL 5. ISU STRATEGIS BKPSDM 2025-2029	14
TABEL 6. PELAYANAN BKPSDM KOTA BALIKPAPAN.....	16
TABEL 7. PERBANDINGAN PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE 2021-2026 DAN PERIODE 2025- 2029.....	23
TABEL 8. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	26
TABEL 9. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BKPSDM TAHUN 2023.....	30
TABEL 10. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	34
TABEL 11. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	34
TABEL 12. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	35
TABEL 13. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025 PER	36
TABEL 14. RINCIAN HASIL EVALUASI.....	41
TABEL 15. MATRIKS TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA	41
TABEL 16. SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA SASARAN STRATEGIS	43
TABEL 17. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025	45
TABEL 18. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2025 -2029	46
TABEL 19.REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	48
TABEL 20. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2025-2029 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA.....	51
TABEL 21. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPSDM TAHUN 2021-2026.....	53
TABEL 22. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPSDM 2025-2029.....	54
TABEL 23. REALISASI KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	55
TABEL 24. REALISASI KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	56
TABEL 25. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA TAHUN 2025	

BERDASARKAN RENSTRA 2021 -2026	58
TABEL 26. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029	65
TABEL 27. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA PADA MASA TRANSISI RENSTRA	74
TABEL 28. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) BKPSDM MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN	88
TABEL 29. KOMPOSISI/PERBANDINGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	89
TABEL 30. SARANA PRASARANA BKPSDM KOTA BALIKPAPAN	90
TABEL 31. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)	93
TABEL 32. REALISASI ANGGARANRAN BKPSDM TAHUN 2025.....	98

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM	7
GAMBAR 2. RINCIAN PEGAWAI BKPSDM KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN JABATAN.....	8
GAMBAR 3. RINCIAN PEGAWAI BKPSDM KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN GOLONGAN.....	9
GAMBAR 4. RINCIAN PEGAWAI BKPSDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	9
GAMBAR 5. RINCIAN PEGAWAI BKPSDM BERDASARKAN PENDIDIKAN	10
GAMBAR 6. ISU STRATEGIS BKPSDM KOTA BALIKPAPAN 2021- 2026	12
GAMBAR 7. PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN TEKNIS UMUM TAHUN 2025	84
GAMBAR 8. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI MELALUI E KINERJA BKN.....	85
GAMBAR 9. KEGIATAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	85
GAMBAR 10. KEGIATAN SAKIP BKPSDM DAN PENERIMAAN PENGHARGAAN WALIKOTA AWARD TAHUN 2025.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Penghargaan Tahun 2025 (bila ada);
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025;

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BKPSDM Kota Balikpapan sebagai organisasi pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBD sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Peraturan presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian/lembaga / daerah juga diwajibkan dalam penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKPSDM Kota Balikpapan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* (pemangku kepentingan) demi perbaikan BKPSDM Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 BKPSDM Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020- 2024;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kota Balikpapan Nomor 800/098/BKPSDM tanggal 22 Desember 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BKPSDM Kota Balikpapan Nomor 800/096/BKPSDM Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan disusun dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Balikpapan dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan di Tahun Anggaran 2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan Laporan Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025;
2. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BKPSDM Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025;
3. sebagai bahan perbaikan kinerja BKPSDM Kota Balikpapan di masa yang akan datang;
4. sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, sebagai media untuk mewujudkan clean goverment menuju *good governance*.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dasar pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

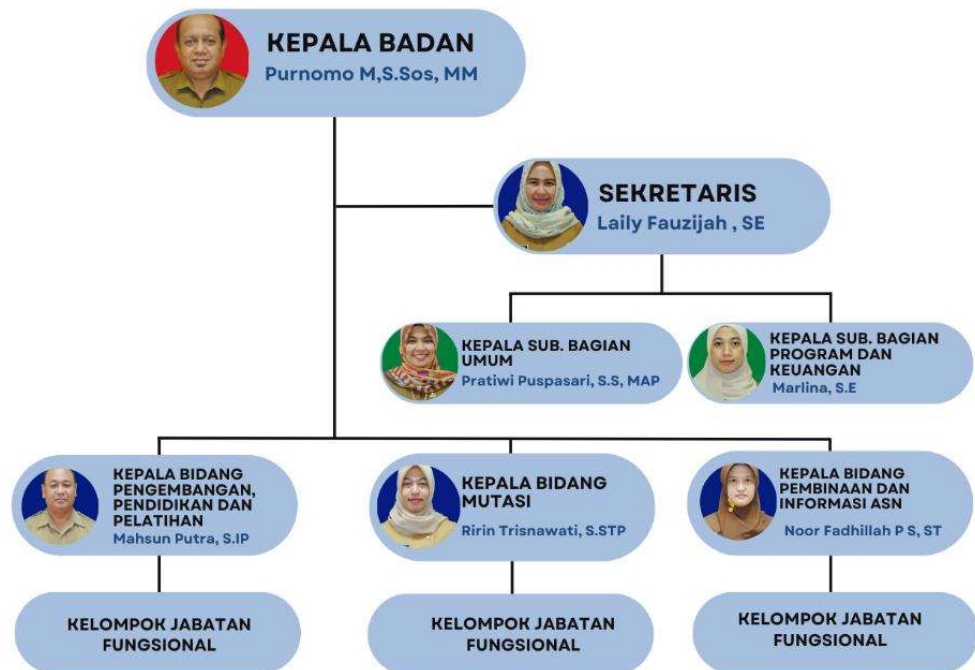
Berdasarkan Peraturan Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BKPSDM Kota Balikpapan mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, mengamanahkan BKPSDM Kota Balikpapan untuk melaksanakan fungsi:

1. perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
2. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara;
4. pelaksanaan mutasi dan promosi aparatur sipil negara;
5. pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
6. pengelolaan dan pengendalian sistem informasi, data dan dokumen aparatur sipil negara; pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara;
7. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen aparatur sipil negara;
8. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
9. penentuan dan pembinaan pola karier aparatur sipil negara;
10. pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
11. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

13. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat, BKPSDM Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BKPSDM

Sumber: BKPSDM Balikpapan

BKPSDM Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan didukung oleh sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 62 orang. ASN BKPSDM terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dan Pegawai

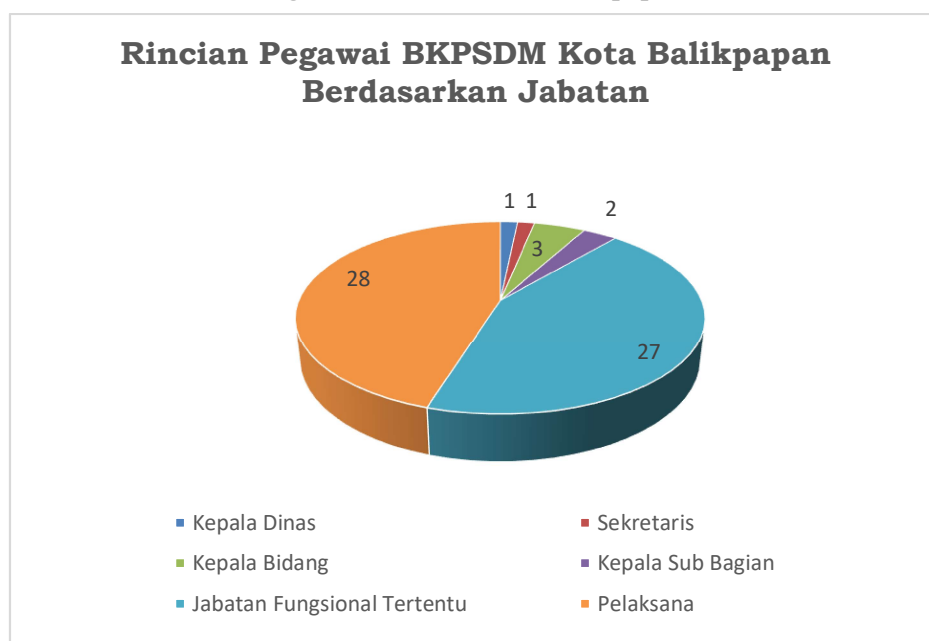
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 16 (enam belas) orang. Berikut rincian pegawai BKPSDM Kota Balikpapan:

Tabel 3. Rincian Pegawai BKPSDM Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Dan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol. IV	P3K	Non ASN	Jumlah
1	Kepala Dinas	0	0	0	1	0	0	1
2	Sekretaris	0	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang	0	0	1	2	0	0	3
4	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	0	0	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	14	0	13	0	27
6	Pelaksana	0	7	16	2	3	0	28
					TOTAL			62

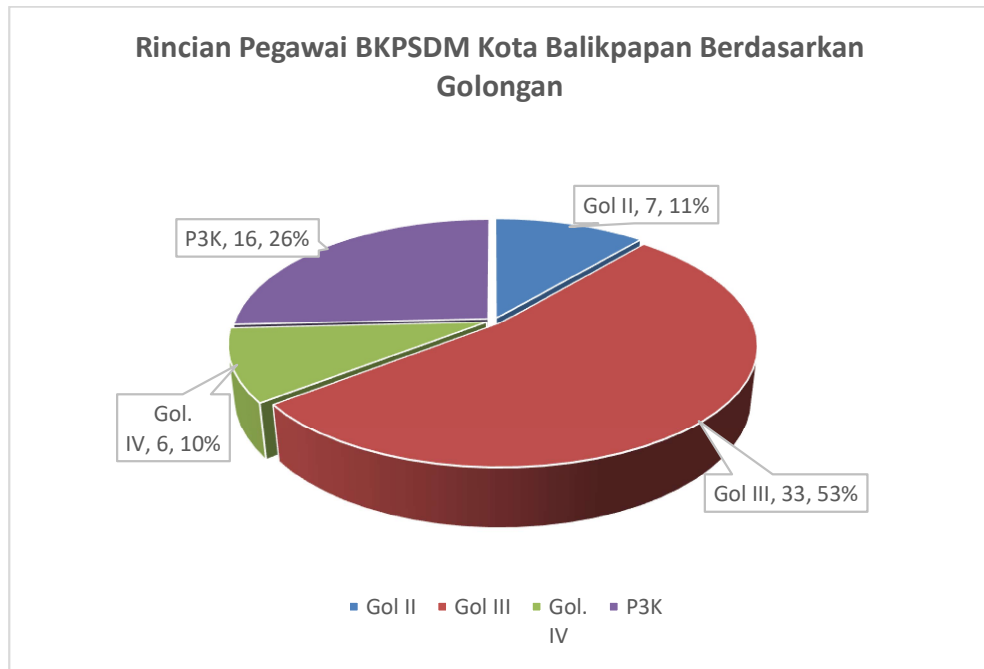
Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan

Gambar 2. Rincian Pegawai BKPSDM Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan



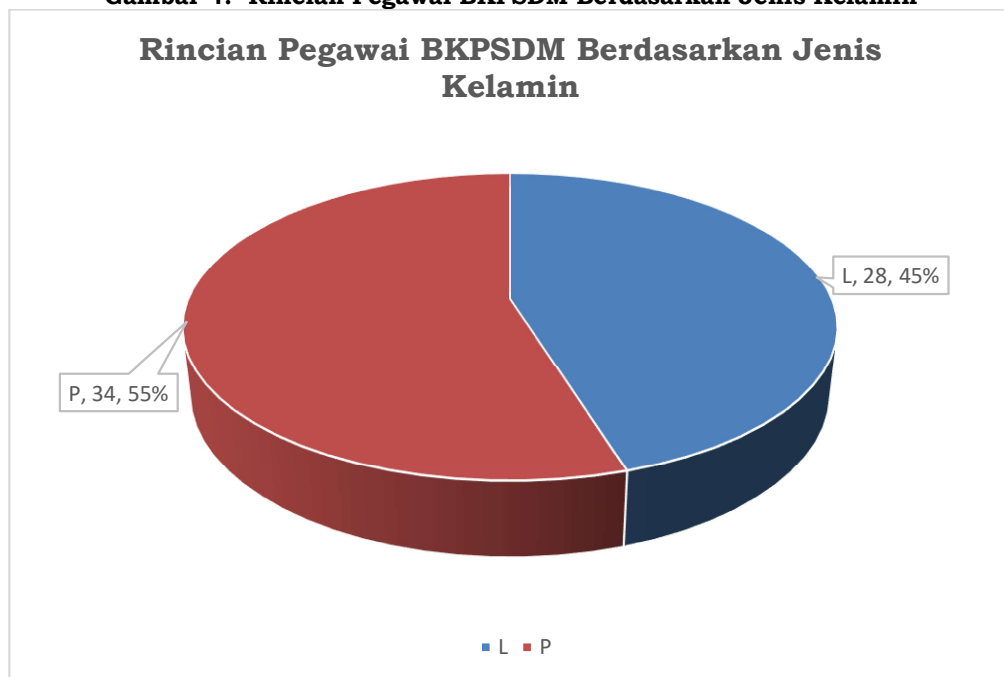
Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan

Gambar 3. Rincian Pegawai BKPSDM Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan



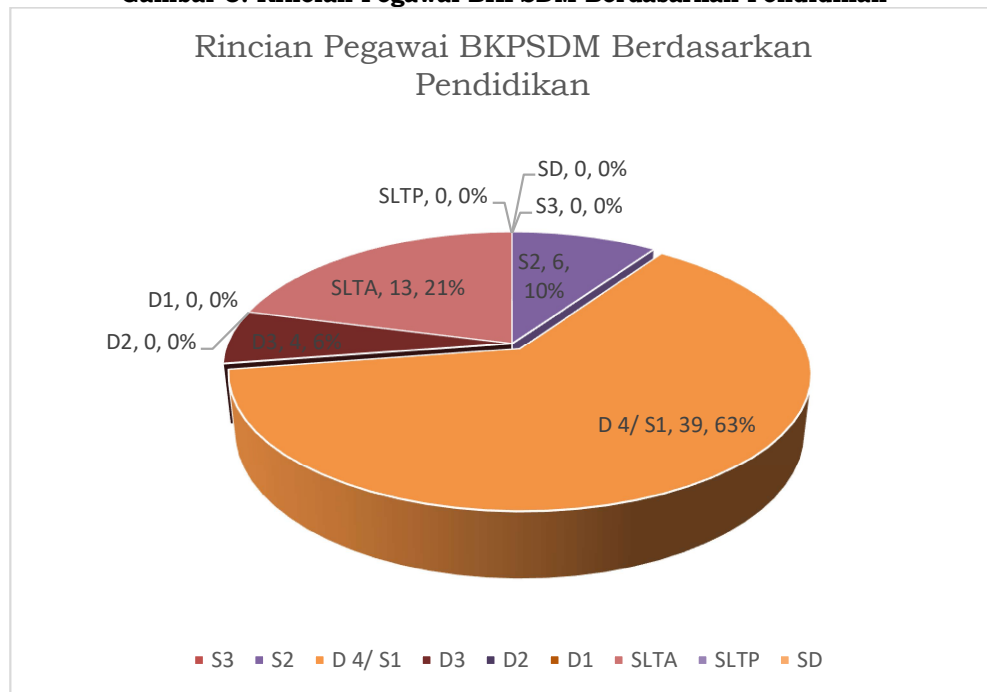
Sumber: SIMPEG BKPSDM Balikpapan

Gambar 4. Rincian Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: SIMPEG BKPSDM Balikpapan

Gambar 5. Rincian Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pendidikan



Sumber: SIMPEG BKPSDM Balikpapan

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.

Pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan mandat dari pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani urusan penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia yang menjalankan Pemerintahan di Kota Balikpapan.

Tahun 2025, merupakan tahun dimana Kota Balikpapan berada pada masa transisi perencanaan. Tahun 2025 berada diantara tahun perencanaan periode 2021-2026 dan tahun perencanaan periode 2025-2029. Pada periode tahun 2021 -2026, mandat yang diterima BKPSDM sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat yang mengatur sumber daya aparatur tertuang dalam Nawacita Kedua dan ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2020- 2024. Salah satu isu strategis, Reformasi dan Tata Kelola dalam Nawacita Kedua yang menjadi landasan BKPSDM adalah **Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional**. Berdasarkan aspek strategis tersebut, terdapat permasalahan yang ditemui dalam manajemen ASN Kota Balikpapan. Pemasalahan tersebut dipetakan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Pemasalahan Strategis BKPSDM Kota Balikpapan 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penerapan Sistem Merit manajemen ASN	Masih terdapat Nilai sistem merit yang masih kurang dari setiap 8 aspek penilaiannya .	• Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Telah dilakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit. Total Akhir Penilaian Instansi dari KASN sebesar 266 atau dalam kategori baik. • Terdapat beberapa titik lemah pada aspek sistem informasi yaitu: - Belum disusun pola karir - Belum optimalnya penerapan manajemen talenta dan manajemen kinerja
2	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Masih rendah	•Masih adanya gap kompetensi dan kualifikasi ASN •Masih adanya ASN berkinerja di bawah kriteria baik. •Masih kurangnya kedisiplinan pegawai •Masih Kurangnya PNS berdasarkan Perencanaan Kebutuhan ASN.	•Belum seluruh ASN memperoleh pendidikan dan pelatihan • Kurangnya pembinaan internal perangkat daerah • Kurangnya moitoring dan evaluasi kinerja ASN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Perkembangan Teknologi Menuntut Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	- Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) - Belum terinterasinya layanan kepegawaian dengan Sistem Informasi ASN - Kurangnya inovasi pelayanan	Upaya pengembangan SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum seluruhnya diberikan kepada ASN
4	Integrasi Data Kepegawaian Belum Optimal	Penyediaan data kepegawaian dalam sistem informasi ASN belum realtime	- Proses integrasi data masih belum optimal. - Data Kepegawaian belum seluruhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN

Sumber: Renstra BKPSDM Balikpapan Tahun 2021 -2026

Beberapa permasalahan dalam manajemen ASN tersebut kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis BKPSDM 2021-2026 sebagaimana tertera dalam gambar berikut.

Gambar 6. Isu Strategis BKPSDM Kota Balikpapan 2021- 2026



Sumber: Renstra BKPSDM Balikpapan Tahun 2021- 2026

Diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pada tahun perodesasi 2025-2029.

Periode tahun perencanaan 2025 -2029 di tandai dengan adanya mandat yang dikenal dengan Asta Cita. Asta cita tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Dalam Asta Cita Prioritas 7, disebutkan tentang **Penerapan prinsip meritokrasi melalui peningkatan kesejahteraan ASN melaui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja, penguatan manajemen talenta ASN, penerpan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar, digitalisasi manajemen ASN, penerpan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas ASN serta penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN.**

Berdasarkan aspek strategis tahun 2025-2029 tersebut, terdapat permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan manajemen ASN Pemerintah Kota Balikpapan. Pemasalahan tersebut dipetakan dalam tabel berikut.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 5. Isu Strategis BKPSDM 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
ASN Kota Balikpapan	Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit	Nihil	Perkembangan teknologi	Asta Cita Prioritas 7, yaitu Penerapan prinsip meritokrasi melalui peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja, penguatan manajemen talenta ASN, penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar, digitalisasi manajemen ASN, penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas ASN serta penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN	RPJMD Kota Balikpapan: Isu Strategis 6: Peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam kebijakan promosi dan mutasi ASN yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem akuntabilitas daerah.	Meningkatkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit
	Belum Optimalnya peningkatan profesionalitas ASN	Nihil	Perkembangan teknologi	Renstra BKN: Perkembangan teknologi . Diperlukan dukungan kompetensi ASN dalam hal data analitis, teknologi serta komunikasi. Merujuk pada dimensi kompetensi dan dimensi kinerja yang nilainya belum optimal	RPJMD Kota Balikpapan: Misi 1: Peningkatan profesionalitas ASN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN	Peningkatan profesionalitas ASN

Sumber: Renstra BKPSDM Balikpapan Tahun 2025-2029

Pada kedua periodisasi perencanaan tersebut, berdasarkan aspek strategis dan permasalahan dalam lingkup tersebut, fokus pelaksanaan penyelenggaraan manajemen ASN di Kota Balikpapan masih kepada penerapan sistem merit dengan penekanan manajemen talenta yang dapat menghasilkan ASN profesional. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian misi ke-1 (satu) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 yaitu **Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat.**

Upaya- upaya BKPSDM Kota Balikpapan dalam mencapai penerapan sistem merit yang optimal di terjemahkan dalam pelayanan publik yang diberikan kepada ASN Kota Balikpapan. Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan tidak hanya melibatkan SDM aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, akan tetapi bekerjasama dengan perangkat daerah terkait, instansi terkait lainnya, antara lain Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), BKN Pusat dan Regional, BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Administrasi Negara, PT Taspen, PT Askes, PT Bank Kaltimara, universitas terakreditasi dan penyelenggara diklat terakreditasi dan lain-lain. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Adapun pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan

No	Jenis Pelayanan	Ketersediaan SP	Tahun Penetapan SP	Produk Layanan	Digitalisasi Layanan	Kanal Layanan yang Digunakan
1	Usulan Peninjauan Masa Kerja PNS	Tersedia	2024	Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan	Hybrid	Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
2	Permohonan izin perceraian	Tersedia	2024	Surat Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil / Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Wali Kota	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
3	Pengurusan Mutasi Internal	Tersedia	2024	Surat Keputusan Mutasi Internal yang ditandatangani oleh Walikota	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
4	Pengusulan PWK Masuk	Tersedia	2024	Surat Keputusan Walikota Balikpapan PWK Masuk	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
5	Pengurusan PWK Keluar	Tersedia	2024	Surat Keputusan Walikota Balikpapan PWK Masuk	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
6	Pengurusan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Tersedia	2024	Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Wali Kota	Hybrid	Online via Web/Mobile App
7	Pengurusan Surat Keputusan Pemberhentian	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	Hybrid	Online via Web/Mobile App

No	Jenis Pelayanan	Ketersediaan SP	Tahun Penetapan SP	Produk Layanan	Digitalisasi Layanan	Kanal Layanan yang Digunakan
	n dari Jabatan Fungsional			yang ditandatangani Wali Kota		
8	Pengurusan Surat Keputusan Pengangkatan Perpindahan ke dalam Jabatan fungsional	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pengangkatan Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani Wali Kota	Hybrid	Online via Web/Mobile App
9	Pengurusan Surat Keputusan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pengangkatan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani Wali Kota	Hybrid	Online via Web/Mobile App
10	Pengurusan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama ke dalam Jabatan Fungsional	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pengangkatan Pengangkatan Pertama ke dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani Wali Kota	Hybrid	Online via Web/Mobile App
11	Pengurusan Surat Keputusan Pengangkatan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pengangkatan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani Wali Kota	Hybrid	Online via Web/Mobile App
12	Penerbitan Berita Acara Sumpah/janji PNS atau PPPK	Tersedia	2024	Penerbitan Berita Acara Sumpah/janji PNS atau PPPK	Manual	Tatap Muka, Telp/E-Mail
13	Usulan Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian	Tersedia	2024	Sertifikat yang ditandatangani kepala BKPSDM	Full Online	Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
14	Usulan Kenaikan Pangkat	Tersedia	2024	Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BKN (an. Presiden), Gubernur Kalimantan	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail

No	Jenis Pelayanan	Ketersediaan SP	Tahun Penetapan SP	Produk Layanan	Digitalisasi Layanan	Kanal Layanan yang Digunakan
				Timur dan Wali Kota Balikpapan		
15	Usulan Tanda Kehormatan Kehormatan Satyalancana Karya Satya	Tersedia	2024	Piagam Penghargaan dan Petikan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Presiden	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
16	Penerbitan surat Keputusan Pensiun PNS	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pensiun yang ditandatangani di Walikota	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail
17	Pengurusan Surat Tugas Belajar	Tersedia	2024	Surat Tugas Belajar yang ditandatangani di Walikota	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
18	Usulan Pencantuman Gelar	Tersedia	2024	Surat Tugas Belajar yang ditandatangani di Walikota	Hybrid	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
19	Usulan Ujian dinas	Tersedia	2024	Sertifikat yang ditandatangani kepala BKPSDM	Hybrid	Online via Web/Mobile App, Tatap Muka, Telp/E-Mail
20	Permintaan Data	Tersedia	2024	Data / Laporan / Informasi	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
21	Pencetakan Badge Pegawai	Tersedia	2024	Kartu Badge Pegawai	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
22	Peminjaman Arsip Fisik	Tersedia	2024	Arsip/berkas yang dibutuhkan	Manual	Telp/E-Mail, Tatap Muka
23	Pengajuan Kartu Istri/Kartu Suami	Tersedia	2024	Kartu Istri dan Kartu Suami	Full Online	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
24	Penyusunan Formasi Kebutuhan CASN	Tersedia	2024	Surat pengusulan kebutuhan ASN yang telah ditandatangani	Full Online	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail

No	Jenis Pelayanan	Ketersediaan SP	Tahun Penetapan SP	Produk Layanan	Digitalisasi Layanan	Kanal Layanan yang Digunakan
				i PPK beserta lampirannya		
25	Penerbitan SK CPNS	Tersedia	2024	SK CPNS	Full Online	Tatap Muka, Telp/E-Mail, Online via Web/Mobile App
26	Pembuatan SK PPPK	Tersedia	2024	SK PPPK	Full Online	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
27	Pembuatan SPK PPPK	Tersedia	2024	SPK PPPK	Manual	Tatap Muka, Telp/E-Mail
28	fasilitasi bagi peserta pelatihan Teknis dan/atau Fungsional	Tersedia	2024	Surat Tugas Surat Bebas Tugas Fasilitas Administrasi Keuangan Peserta Surat Tugas Mentor Peserta Mengikuti dan lulus Pelatihan Teknis dan/atau Fungsional	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
29	Penerbitan SK pengangkatan PNS	Tersedia	2024	SK Pengangkatan PNS	Hybrid	Tatap Muka, Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
30	Pembayaran Klaim THT dan pensiun Pertama PNS	Tersedia	2024	Klaim THT Pensiun	Full Online	Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
31	Bantuan Pengobatan Rawat Inap PNS	Tersedia	2024	Bantuan Pengobatan Rawat Inap PNS	Manual	Tatap Muka, Telp/E-Mail
32	Pelayanan Pembayaran Tali Asih PNS	Tersedia	2024	Tali Asih PNS	Hybrid	Online via Web/Mobile App
33	Fasilitasi Kepesertaan Pelatihan Dasar CPNS	Tersedia	2024	Surat Tugas; Surat Bebas Tugas; Fasilitas Administrasi Keuangan Peserta; Surat Tugas Mentor; Peserta Mengikuti dan lulus Latsar CPNS	Hybrid	Online via Web/Mobile App, Tatap Muka, Telp/E-Mail

No	Jenis Pelayanan	Ketersediaan SP	Tahun Penetapan SP	Produk Layanan	Digitalisasi Layanan	Kanal Layanan yang Digunakan
34	Pengurusan SK Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS	Tersedia	2024	Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang ditandatangani Sekda dan atau Walikota	Hybrid	Online via Web/Mobile App, Tatap Muka, Telp/E-Mail
35	Bantuan Kematian PNS	Tersedia	2024	Bantuan Kematian PNS	Manual	Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
36	Fasilitasi bagi peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Tersedia	2024	Surat Tugas Surat Bebas Tugas Fasilitasi Administrasi Keuangan Peserta Surat Tugas Mentor Peserta Mengikuti dan lulus Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Hybrid	Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail
37	Pengadaan ASN	Tersedia	2024	Surat Keputusan Pembentukan Tim Panselda	Full Online	Online via Web/Mobile App, Telp/E-Mail

Sumber: BKPSDM Balikpapan

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan Laporan Kinerja; landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum BKPSDM Kota Balikpapan, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program,

kegiatan dan perjanjian kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta strategi pemecahan masalah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis BKPSDM berisikan arah kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan BKPSDM selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKPSDM merupakan dasar bagi penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja BKPSDM tahun 2025. Perencanaan strategis selanjutnya diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah. Tahun 2025, merupakan tahun dimana Kota Balikpapan berada pada masa transisi perencanaan. Tahun 2025 berada diantara tahun perencanaan periode 2021-2026 dan periode 2025-2029. Renstra periode 2025-2029 disusun sebelum perodesasi Renstra 2021- 2026 berakhir sebagai akibat diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, bahwa Kepala Daerah memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra tersebut dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kota.

Dokumen Rencana Strategis BKPSDM Periode 2021- 2026 di tetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 sedangkan Rencana Strategis BKPSDM Periode 2025- 2029 ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Berikut disajikan gambaran perencanaan strategis BKPSDM pada kedua periode tersebut;

Tabel 7. Perbandingan Perencanaan Strategis Periode 2021-2026 dan periode 2025- 2029

Uraian		Renstra 2021-2026						Renstra 2025-2029						
		Data Capaian Awal Tahun Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Tahun Renstra	2025	2026	2027	2028	2029	
Visi	Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman							Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman						
Misi	Mewujudkan penyelenggaraa n tata pemerintahan yan baik							Membangun dan mengembangk an Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat						
Tujuan / Indikator Kinerja	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit/ Indeks Sistem merit	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan sistem merit ASN/Indeks Sistem merit	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Uraian		Renstra 2021-2026						Renstra 2025-2029						
		Data Capaian Awal Tahun Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Tahun Renstra	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran/Indikator Kinerja	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN/Indeks Profesionalitas ASN	47,87	55	57	59	61	62	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN/Indeks Profesionalitas ASN	78,59	79	79,5	79,8	80	80,2
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	32,36	34,03	34,06	34,25	34,42	34,69	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai AKIP BKPSDM	87,69	88,02	88,05	88,75	89	89,05

Sumber: BKPSDM Balikpapan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025, menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM 2021- 2026 dan bukan semata-mata untuk pembiayaan tugas fungsi BKPSDM Kota Balikpapan saja.

Berikut disajikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/Sasaran BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,80	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,69			
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	79	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
								Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
							Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
							Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Assessment Center

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
								Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
							Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
								Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
								Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
								Pembinaan Disiplin ASN
								Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
								Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
								Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BKPSDM Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	34,42	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP OPD	89,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber : Renja BKPSDM Tahun 2025

1.2. Indikator Kinerja Utama

Dasar pelaksanaan arah program kegiatan 2025 berdasar kepada Surat Keputusan (SK IKU) Perubahan BKPSDM Kota Balikpapan Nomor: 800/098/BKPSDM tanggal 22 Desember 2023. IKU ini disusun berdasarkan Renstra BKPSDM 2021-2026. Indikator kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Balikpapan mengalami perubahan pada akhir tahun 2023. IKU Perubahan ini disusun seiring dengan adanya review IKU BKPSDM Kota Balikpapan. Perubahan salah satu IKU BKPSDM yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Balikpapan. Hal ini merujuk kepada hasil rekomendasi Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Perubahan IKU tersebut tertuang dalam SK IKU Perubahan BKPSDM Kota Balikpapan Nomor: 800/098/BKPSDM tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Perubahan BKPSDM Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalis	IP= indeks profesionalisme dimensi kualifikasi + indeks profesionalisme dimensi kompetensi+ indeks profesionalisme dimensi kinerja + indeks	• Bidang Mutasi • Bidang Pendidikan dan Pelatihan • Bidang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			me ASN.	profesionalisme dimensi disiplin	g Pembi naan dan Infor masi ASN	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM yang diperoleh dari laporan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Kota Balikpapan.	Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat BKPSDM	

Sumber: SK IKU Perubahan BKPSDM 2023

Penetapan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditindaklanjuti dengan penyusunan SK IKU Kepala BKPSDM Nomor 800/003/BKPSDM/2026. Berikut disajikan IKU BKPSDM 2025- 2029.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Indeks Sistem Merit	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	Indeks Merit Sistem = Σ (Skor Bobot dalam setiap aspek / Skor maksimal $\times$ bobot maksimal)	- Bidang Mutasi - Bidang Pendidikan dan Pelatihan - Bidang Pengembangan dan Informatika ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
1.1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan	IP= indeks profesionalisme dimensi kualifikasi + indeks profesionalisme dimensi kompetensi+ indeks profesionalisme	- Bidang Mutasi - Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	me dimensi kinerja + indeks profesionalis me dimensi disiplin	han • Bidang g Pembinaan dan Infor masi ASN	
1. 2	Meningkat nya kualitas Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP BKPSDM	Pertanggungj awaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai evaluasi akuntabilitas	Sekreta riat BKPSD M	

1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BKPSDM Kota Balikpapan telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan gambaran komitmen Kepala BKPSDM dalam rangka pencapaian target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan perjanjian kinerja tahunan ini sesuai dengan Amanah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja BKPSDM Tahun 2025 selain menyajikan indikator dari Indikator kinerja utama Renstra BKPSDM 2021-2026, juga memperjanjikan 1 (satu) indikator diluar IKU BKPSDM. Indikator dimaksud adalah Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN. NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Berikut adalah uraian Perjanjian Kinerja BKPSDM 2025:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	88

Sumber : Perjanjian Kinerja BKPSDM

Pada tahun 2025, BKPSDM melakukan evaluasi kinerja dan melaksanakan penyesuaian perjanjian kinerja. Hal tersebut di dituangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025. Perjanjian kinerja perubahan tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	88

Sumber : Perjanjian Kinerja perubahan BKPSDM

Masa transisi perencanaan tahun 2025, juga mengakibatkan pada disusunnya perjanjian kinerja perubahan BKPSDM dengan dasar Renstra BKPSDM tahun 2025- 2029. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan 2025-2029, serta menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah. Berikut adalah rincian perjanjian kinerja Perubahan BKPSDM berdasarkan Renstra BKPSDM 2025- 2029.

**Tabel 12. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Atas Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2024	Target
1	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,68	0,69
1.1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,59	80
1.2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	87,69	88

Sumber : Perjanjian Kinerja perubahan BKPSDM 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang

sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan BKPSDM Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan BKPSDM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, BKPSDM melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar 24.787.734.480,00. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar 26.604.931.522,00 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja BKPSDM secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian alokasi anggaran BKPSDM tahun 2025.

Tabel 13. Rencana Anggaran Tahun 2025 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80.00			
		Indeks NSPK Manajemen ASN	74.00			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,619,100,755.00	
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2,229,540,625.00	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2,608,010.00	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	696,373,375.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10,000,000.00	
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,009,945,570.00	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	204,074,890.00	
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	306,538,780.00	
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	515,364,720.00	
				Pengelolaan Mutasi ASN	36,675,050.00	
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,499,770.00	
				Pengelolaan Promosi ASN	451,189,900.00	
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1,629,900,105.00	
				Pengelolaan Assessment Center	537,531,685.00	
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1,011,608,420.00	
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	80,760,000.00	
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244,295,305.00	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32,295,920.00	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	31,000,000.00	
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50,000,000.00	
				Pembinaan Disiplin ASN	51,999,575.00	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43,999,810.00	
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	35,000,000.00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN	5,625,352,113.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				SUMBER DAYA MANUSIA		
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	3,824,392,969.00	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3,815,477,509.00	
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	8,915,460.00	
				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,800,959,144.00	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,800,959,144.00	
	Meningkatnya	Nilai SAKIP	88.00	PROGRAM	16,360,478,654.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,143,421,000.00	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,143,421,000.00	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	881,588,000.00	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126,588,000.00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	755,000,000.00	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,436,729,104.00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646,201,619.00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	446,675,610.00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,682,700.00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294,169,175.00	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553,200,000.00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	553,200,000.00	
				Kegiatan Penyediaan Jasa	35,927,000.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,355,000.00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,572,000.00	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309,613,550.00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201,480,000.00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,986,100.00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,147,450.00	
				Jumlah	26,604,931,522.00	

Sumber : DPA Perubahan BKPSDM 2025

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil merupakan hal yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Secara rutin, Inspektorat Kota Balikpapan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKPSDM pada tahun 2025 untuk sistem AKIP 2024 adalah sebesar 88,02 dengan predikat A (Memuaskan). Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Tahun 2025 atas penilaian 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,91
2	Pengukuran Kinerja	30	27,53
3	Pelaporan Kinerja	15	12,58
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	21,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	88,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Memuaskan	

Sumber: LHE Inspektorat

Tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP BKPSDM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15. Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	1. Agar pohon kinerja yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, agar lebih dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja;	1. Pohon kinerja BKPSDM digunakan dalam perencanaan kinerja tahun 2025 yaitu sudah digunakan dalam perencanaan kinerja SKP dari Ess II sampai dengan staf/pelaksana. Sudah disusun crosscutting antar bidang maupun antar PD

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
			berdasarkan pohon kinerja;
		2. Agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;	2. Peningkatan pemahaman dan kepedulian pencapaian kinerja dari Kepala Perangkat daerah sampai pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi internal penyusunan penjenjangan kinerja BKPSDM. Komitmen seluruh individu dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan di susun dalam perjanjian kinerja dan SKP Individu (Kepala Perangkat Daerah sampai dengan pelaksana);
		3. Agar rincian rencana aksi yang disusun mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja.	3. Telah disusun rencana aksi 2025 untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja 2025.
2	Pengukuran	1. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja;	1. Telah terjadi peningkatan kinerja pada tingkat Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada tahun 2025;
		2. Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja;	2. Setiap pegawai telah meningkatkan pemahaman dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja setiap pegawai telah dilakukan setiap bulan pada tahun 2025. Tidak hanya pada tingkat individu, pengukuran kinerja secara rutin juga dilakukan pada tingkatan kinerja utama perangkat daerah;
		3. Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari pimpinan perangkat daerah sampai ke tingkat individu pegawai.	3. Pengukuran kinerja dari pimpinan perangkat daerah sampai dengan tingkat individu telah menggunakan sistem informasi e kinerja BKN dan juga aplikasi REAKSI
3	Pelaporan	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dan	Penyajian laporan kinerja perangkat daerah selalu di sajikan berdasarkan kontribusi data dan informasi dari seluruh unit kerja pada perangkat daerah.

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
		diharapkan seluruh pegawai tetap meningkatkan kepedulian pada penyajian informasi dalam laporan kinerja	
4	Evaluasi Akuntabilitas	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Telah dilakukan upaya tindak lanjut dari seluruh rekomendasi yang telah disampaikan APIP dalam LHE AKIP.

Sumber : BKPSDM 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun keempat Renstra BKPSDM Tahun 2021 -2026 dan tahun pertama Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029. Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis skala nilai peringkat kerja sebagaimana berikut:

Tabel 16. Skala nilai peringkat kinerja sasaran strategis

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi Kota Balikpapan

Pada Bab ini juga akan diuraikan capaian kinerja BKPSDM Kota Balikpapan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, sesuai Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra BKPSDM ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
8. Realisasi anggaran.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Balikpapan didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis sesuai yang telah diperjanjikan oleh Kepala BKPSDM Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2025. Berikut disajikan rincian capaian IKU BKPSDM Kota Balikpapan tahun 2025.

Tabel 17. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	80,19	100,24%	Melebihi Target
			Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74	72,68	98,22%	Tidak Tercapai
1.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP BKPSDM	Persen	88	88,02	100,02%	Melebihi Target

Sumber: BKPSDM 2025

Tabel diatas menjelaskan realisasi kinerja dari indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator kinerja utama meningkatnya profesionalitas ASN yang diwakilkan oleh indikator indeks profesionalitas ASN (IP ASN) telah melebihi target renstra BKPSDM tahun 2025 pada Renstra BKPSDM 2021- 2026. Pada renstra tersebut, nilai indikator IP ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 61. Evaluasi internal BKPSM telah menyepakati penyesuaian target kinerja IP ASN pada perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yaitu kenaikan target menjadi 80. Target tersebut pun terlampaui ketika realisasi yaitu sebesar 80,19 dengan capaian 100,23% dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.
- Sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN selain diwakilkan nilai IP ASN sebagai IKU perangkat daerah, juga di wakilkan oleh indeks manajemen ASN yang menjadi komitmen kepala perangkat daerah. Indeks manajemen ASN

tahun 2025 terealisasi 72,68 dan tidak dapat mencapai target kinerja 74. Indikator ini memiliki capaian 98,21%.

6. IKU BKPSDM yang ke dua adalah Nilai SAKIP BKPSDM. Tahun 2025, nilai hasil evaluasi SAKIP BKPSDM adalah 88. Indikator ini mencapai target kinerja. Indikator ini memiliki capaian kinerja 100,02 %.

Pencapaian kinerja BKPSDM tahun 2025 juga dievaluasi berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra BKPSDM 2025-2029. Tabel dibawah ini menjelaskan pencapaian kinerja tersebut.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra BKPSDM 2025 -2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,69	0,68	98,55%	Tidak Mencapai Target
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	80,19	100,23%	Melebihi Target
1.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP BKPSDM	Persen	88	88,02	100,02%	Melebihi Target

Sumber: BKPSDM 2025

Penjelasan atas tabel diatas adalah sebagai berikut:

4. Indikator kinerja tujuan BKPSDM 2025, yaitu Indeks Sistem Merit terealisasi 0,68 dari target kinerja 0,69 memiliki capaian kinerja 98,55% atau berpredikat Tidak Tercapai.
5. Indikator kinerja utama meningkatnya profesionalitas ASN

diwakilkan oleh indikator indeks profesionalitas ASN (IP ASN). Indikator ini memiliki realisasi sebesar 80,19 dari target kinerja 80,00 dengan capaian 100,23% . Indikator ini memiliki predikat melebihi target.

6. IKU BKPSDM yang ke dua adalah Nilai SAKIP BKPSDM. Tahun 2025, nilai hasil evaluasi SAKIP BKPSDM adalah 88. Indikator ini mencapai target kinerja. Indikator ini memiliki capaian kinerja 100,02 % dengan predikat kinerja melebihi target.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengamanahkan perangkat daerah untuk membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Perbandingan kinerja tahun BKPSDM 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	48,48	-	51,21	93,11%	62,72	110,03%	78,59	124,74%	80,19	100,24%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	41	-	61	93,11%	73,5	105%	72,68	98,22%	72,68	98,22%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	89,23	-	89,95	99,33%	87,49	97,48	87,69	99,64%	88,02	100,02%

Sumber: BKPSDM 2025

Capaian indikator sasaran strategis BKPSDM pada rentang waktu 2021- 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya profesionalitas ASN** dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Pada periodesasi Renstra BKPSDM 2025- 2029 masih dijadikan indikator sasaran BKPSD. Pada rentang waktu 2021 sampai dengan tahun 2025, kenaikan realisasi tertinggi ada di antara tahun 2023 ke tahun 2024. Dimana kenaikan indeks mencapai 15,87 *point* atau memiliki kenaikan sebesar 25,30%. Kenaikan realiasi pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya adalah sebesar 2,03%.
2. Pada sasaran meningkatnya profesionalitas ASN, juga terdapat indikator diluar IKU BKPSDM 2021-2026. Indikator tersebut adalah indikator kinerja NSPK Manajemen ASN. Indikator ini mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2021 sebesar 41 sampai di tahun 2023 menjadi 73,5. Pada tahun 2024 nilai indeks manajemen ASN mengalami penurunan dan mendapatkan nilai indeks 72,68. Sampai dengan akhir tahun 2025, penilaian indeks NSPK manajemen masih belum dilakukan. Jika menggunakan realisasi tahun 2024 maka capaian terhadap tahun 2025 adalah sebesar 98,22%.
3. Sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP BKPSDM. Indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan realisasi dan capaian, yaitu dari nilai pada tahun 2021 dengan realisasi 89,23, 2022 sebesar 89,95 dengan capaian kinerja 99,33% menurun 87,49 pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 97,48% dan meningkat menjadi 87,69 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Kenaikan realisasi nilai AKIP dari tahun

sebelumnya terhadap tahun 2025 adalah sebesar 0,47%.

Penyajian capaian kinerja BKPSDM tahun 2025 juga disajikan berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 atas Renstra 2025- 2029 . Gambaran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra BKPSDM 2025-2029 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.

No	Tujuan/	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	0,62	-	0,65	94,20%	0,68	93,15%	0,68	89,74%	0,68	98,55%
			Indeks Profesionalitas ASN	48,48	-	51,21	93,11%	62,72	110,03%	78,59	124,74%	80,19	100,24%
2	Melalui Penerapan Sistem Merit	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	89,23	-	89,95	99,33%	87,49	97,48	87,69	99,64%	88,02	100,02%

Sumber: BKPSDM 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi pada indikator -indikator yang diperjanjikan.

1. Indikator tujuan Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan mengalami kenaikan realisasi namun mengalami penurunan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan kenaikan target kinerja namun tidak diiringi oleh kenaikan realisasi indikator. Kenaikan realisasi dimulai dari tahun 2021 dimana realisasi indeks sistem merit adalah 0,62. Realisasi indeks mencapai angka 0,65 pada tahun 2022 dan 0,68 pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Kenaikan terbesar realisasi adalah antara tahun 2021 ke tahun 2022 dan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 4,62%. Realisasi mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami stagnasi karena sampai dengan 2025 belum dilakukan penilaian sistem merit oleh BKN.
2. **Meningkatnya profesionalitas ASN** pada perodesasi Renstra BKPSDM 2025- 2029 masih dijadikan indikator sasaran BKPSDM. Sasaran ini masih diwakilkan oleh indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Pada rentang waktu 2021 sampai dengan tahun 2025, kenaikan realisasi tertinggi ada di antara tahun 2023 ke tahun 2024. Dimana kenaikan indeks mencapai 15,87 *point* atau memiliki kenaikan sebesar 25,30%. Kenaikan realiasi pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya adalah sebesar 2,03%.
3. Sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP BKPSDM. Indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan realisasi dan capaian, yaitu dari nilai pada tahun 2021 dengan realisasi 89,23, 2022 sebesar 89,95 dengan capaian kinerja 99,33% menurun 87,49 pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 97,48% dan meningkat menjadi 87,69 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja

sebesar 99,64%. Kenaikan realisasi nilai AKIP dari tahun sebelumnya terhadap tahun 2025 adalah sebesar 0,47%.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Perencanaan Strategis

Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengamanahkan perangkat daerah untuk membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025 Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	80.19	100.24%	62	129.34%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74	72,68	98,22%	100	72.68%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP OPD	Nilai	88	88.02	100.02%	90.56	97.20%

Sumber: BKPSDM 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun ke 5 (lima) realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Pada tabel tersebut terlihat indeks profesionalitas ASN telah melampaui target Renstra BKPSDM, sementara indikator nilai AKIP mendekati target akhir Renstra 2021-2026 dengan capaian kinerja 97,20%. Indeks Manajemen ASN (NSPK) tidak mengalami pergerakan

ketercapaiannya terhadap target akhir renstra 2021-2026 dengan dikarenakan sampai dengan akhir 2025 belum dilakukan penilaian oleh BKN.

Penyajian capaian kinerja tahun 2025 BKPSDM juga di perbandingkan dengan target perjanjian kinerja atas Renstra 2025- 2029. Capaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra BKPSDM 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.69a	0.68	98.55%	0.73	93.15%
1.1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80	80.19	100.24%	80.5	99.61%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP OPD	Nilai	88	88.02	100.02%	90.05	97.75%

Sumber: BKPSDM 2025

IKU yang diampu oleh BKPSDM pada saat penyusunan Renstra 2025-2029 tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi hanya pada tataran target kinerja indikator saja. Perubahan penentuan target tersebut yang menjadi pembeda capaian kinerja BKPSDM terhadap renstra periode terbaru. Pada indikator kinerja yang mengacu Renstra BKPSDM 2021-2026 terdapat indikator yang telah melampaui target akhir yaitu Indeks Profesionalitas ASN sementara jika mengacu pada target Renstra terbaru, belum terdapat

indikator kinerja yang melampaui target akhir kinerja Renstra 2025-2029.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengamanahkan perangkat daerah untuk membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*). Perbandingan kinerja tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 Terhadap pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasi onal/Inter nasional/dl l) 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80.19	86,40	BKPSDM PemKot Bontang
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	72.68	-	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	88.02	80.6	BKD Provinsi Kaltim

Sumber: Biro Organisasi Prov Kalimantan Timur, BKPSDM Kota Bontang

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BKPSDM tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021- 2026, ada yang dapat diperbandingkan dengan standar nasional/daerah lain dan ada yang tidak dapat diperbandingkan. Adapun realisasi kinerja yang dapat diperbandingkan dengan standar nasional/ daerah lain

adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN, diperbandingkan dengan Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Bontang. BKPSDM Pemerintah Kota Bontang memperoleh nilai IP ASN sebesar 86,40.
2. Nilai SAKIP BKPSDM diperbandingkan dengan nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. BKD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,60.

Penyajian capaian kinerja tahun 2025 BKPSDM juga di perbandingkan dengan target perjanjian kinerja perbahan atas Renstra 2025- 2029 terhadap standar nasional/ daerah lain. Capaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 24. Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 Terhadap pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasio nal/Interna sional/dll) 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Indeks Merit Sistem	Indeks	0,68	-	
1.1	Meningkatny a profesionalita s ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,19	86,40	BKPSDM PemKot Bontang
1.2	Meningkatny a Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	88.02	80.6	BKD Provinsi KalTim

Sumber: Biro Organisasi Prov Kalimantan Timur, BKPSDM Kota Bontang

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengamanahkan perangkat daerah untuk menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Analisis tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021 -2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1.1	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80.00	80.19	100.24 %	Komitmen pimpinan serta monitoring evaluasi secara rutin dan berkala terhadap peningkatan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN Pemerintah Kota Balikpapan	- Diseminasi terkait IP ASN kepada pengelola kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - Updating data Pegawai; - Penyebaran Google Form ke seluruh ASN untuk updating data Kompetensi ASN; - Koordinasi ke BKN terkait penghapusan beberapa Pegawai yang tidak aktif agar tidak masuk ke dalam pengukuran IPA SN; - Monitoring secara berkala ke seluruh ASN; - Membuat surat edaran agar ASN secara mandiri melengkapi data yang dibutuhkan dalam aspek pengukuran; - Penyelesaian Disparitas Data.	- Evaluasi aspek -aspek didalam dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin yang mendukung Indeks profesionalitas ASN Pemerintah Kota Balikpapan. - Pemetaan kondisi terkini aspek-aspek dimensi pendukung IPA ASN ke dalam penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2025.
								Dimensi Kualifikasi:	
								- Pemberian fasilitas tugas belajar melalui tugas belajar yang dibiayai APBD maupun tugas belajar mandiri; - Fasilitasi pencantuman gelar sesuai ketentuan	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
								Dimensi Kompetensi:	
								1. Pemanfaatan platform ASN Berpijar melalui zoom meeting; 2. Membuat surat edaran Wali Kota tentang pemanfaatan platform asn berpijar dalam rangka pembelajaran mandiri digital dalam pengembangan kompetensi bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Balikpapan; 3. Melakukan fasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajerial, fungsional, teknis dan prajabatan (latsar CPNS) serta orientasi PPPK 4. Melakukan peremajaan data pengembangan kompetensi melalui aplikasi SIMPEG dan sinkronisasi ke SI ASN	
								Dimensi Kinerja:	
								1. Melakukan komunikasi secara intensif ke Direktorat PSID, Direktorat Kinerja, Direktorat	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
								Wasdal BKN Pusat, dan Kanreg VIII Banjarmasin terkait seluruh kendala yang dialami, seperti error aplikasi, perubahan fitur, tarikan data, sinkronisasi data pegawai, pengaliran data dari Ruang GTK ke eKinerja BKN, API eKinerja ke aplikasi TPP Pemkot Balikpapan, dan permasalahan lainnya yang muncul dikarenakan perubahan sistem; 2. Melakukan Sosialisasi langsung terkait Kinerja ke OPD; 3. Melakukan penyelesaian Disparitas Data Kinerja; 4. Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait kinerja secara rutin baik internal maupun melibatkan pimpinan tinggi OPD; 5. Membuat Surat Sekretaris Daerah ke Kepala BKN terkait Perubahan Jadwal Pengaliran data dari Ruang GTK ke e-Kinerja BKN; 6. Membuat Surat Sekretaris Daerah setiap Awal Tahun dan Akhir tahun kepada seluruh Kepala OPD perihal penyelesaian	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
								SKP di e-Kinerja BKN; 7. Membuat Surat Sekretaris Daerah secara rutin hasil monitoring penyelesaian SKP secara periodik bulanan; 8. Menghadiri/mengikuti zoom meeting yang dilaksanakan oleh BKN dan Kemendikdasmen; 9. Mentoring dan Coaching Clinic terkait pengisian dan permasalahan SKP baik untuk Tenaga Teknis maupun Guru; 10. Melakukan pengecekan terhadap data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan guna memastikan konsistensi dan mencegah terjadinya disparitas data SKP pada tahun berikutnya.	
								Dimensi Disiplin:	
								1. Melakukan monitoring tingkat kehadiran ASN setiap bulannya; 2. Menyusun draft kebijakan disiplin ASN; 3. Melakukan proses pembinaan atas dugaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	74.00	72.68	98.22%	Realisasi menggunakan realisasi terakhir tahun 2024. Sampai dengan akhir Desember 2025 belum dilaksanakan penilaian NSPK oleh BKN.	4. Melakukan Sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan Disiplin ASN. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), belum menetapkan dan menerapkan pola karir instansi. Belum ditetapkannya pola karir dikarenakan peraturan kepala daerah tentang pola karir instansi belum disahkan. Sampai dengan saat ini BKPSDM selaku <i>leading sector</i> masih terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar peraturan walikota tentang pola karir segera diterbitkan. 2. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh. SKJ baru disusun sebagian yaitu pada tataran	Koordinasi secara intensif ke BKN terkait penyesuaian elemen- elemen dalam NSPK manajemen ASN terbaru sebagai bahan penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelenggaraan NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kota Balikpapan

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
								Jabatan Tinggi Pratama (JPT). Sampai dengan saat ini masih dilakukan proses penyusunan dan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Balikpapan secara intensif untuk ketersediaan SKJ secara menyeluruh (manajerial, teknis dan sosiokultural). 1. Belum dilaksanakannya promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi. Sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pembaharuan terkait pemenuhan ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>up to date</i> yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja,	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
								kualifikasi dan kompetensi. Data kepegawaian tersebut digunakan sebagai bahan promosi dan mutasi dalam manajemen talenta.	
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	88.00	88.02	100.02 %	Komitmen pimpinan serta monitoring evaluasi secara rutin dan berkala terhadap Penerapan SAKIP di BKPSDM Kota Balikpapan.	1. Peningkatan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal AKIP BKPSDM; 1. Peningkatan koordinasi internal terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal kinerja.	2.

Sumber: BKPSDM 2025

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 26. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
	Meningkatnya aparat birokrasi yang kapabel melalui penerapan sistem merit ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,69	0,68	98,55%	1. Realisasi menggunakan realisasi terakhir yang dinilai oleh KASN. Sampai dengan akhir Desember 2025 belum dilaksanakan penilaian sistem merit sejak diterbitkannya Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. 2. Terbitnya	1. Peningkatan koordinasi dengan BKN terkait pengawasan pengendalian penerapan sistem merit Pemerintah Kota Balikpapan 2. Pemetaan penerapan kondisi aspek -aspek sistem merit Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan aspek-aspek dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2025.	1. Peningkatan kompetensi penerapan sistem merit sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 19 tahun 2025 2. Pembentukan Tim Penilai sistem merit sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 tahun 2025 3. Koordinasi interna secara rutin dan berkala dengan BKN terkait penerapan sistem merit Pemerintah Kota Balikpapan. 4. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala penerapan sistem merit Pemerintah Kota Balikpapan.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
							Peraturan Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Dalam aturan tersebut termuat ketentuan kriteria dan penilaian aspek- aspek sistem merit yang berbeda dari Peraturan Menteri PAN RB sebelumnya. 3. Belum terbitnya Peraturan Teknis Kepala BKN tentang penilaian sistem merit sehingga nilai sistem merit sesuai dengan kriteria terbaru belum dapat dilaksanakan.		

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
1.1	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80.00	80.19	100.24 %	Komitmen pimpinan serta monitoring evaluasi secara rutin dan berkala terhadap peningkatan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1. Updating data Pegawai; 2. Penyebaran Google Form ke seluruh ASN untuk updating data Kompetensi ASN; 3. Koordinasi ke BKN terkait penghapusan beberapa Pegawai yang tidak aktif agar tidak masuk ke dalam pengukuran IPASN; 4. Monitoring secara berkala ke seluruh ASN; 5. Membuat surat edaran agar ASN secara mandiri melengkapi data yang dibutuhkan dalam aspek pengukuran; 6. Penyelesaian Disparitas Data.	1. Evaluasi aspek-aspek didalam dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin yang mendukung Indeks profesionalitas ASN Pemerintah Kota Balikpapan. 2. Pemetaan kondisi terkini aspek-aspek dimensi pendukung IPA ASN ke dalam penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2025.
								Dimensi Kualifikasi:	
								1. Pemberian fasilitas tugas belajar melalui tugas belajar yang dibiayai APBD maupun tugas belajar mandiri; 2. Fasilitasi pencantuman gelar sesuai ketentuan	
								Dimensi Kompetensi:	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
								1. Diseminasi terkait IP ASN kepada pengelola kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 2. Pemanfaatan platform ASN Berpijar melalui zoom meeting 3. Membuat surat edaran Wali Kota tentang pemanfaatan platform asn berpijar dalam rangka pembelajaran mandiri digital dalam pengembangan kompetensi bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota balikpapan 4. Melakukan fasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajerial, fungsional, teknis dan prajabatan (latsar CPNS) serta orientasi PPPK 5. Melakukan peremajaan data pengembangan kompetensi melalui aplikasi SIMPEG dan sinkronisasi ke SI ASN	
								Dimensi Kinerja:	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
								1. Melakukan komunikasi secara intens ke Direktorat PSID, Direktorat Kinerja, Direktorat Wasdal BKN Pusat, dan Kanreg VIII Banjarmasin terkait seluruh kendala yang dialami, seperti error aplikasi, perubahan fitur, tarikan data, sinkronisasi data pegawai, pengaliran data dari Ruang GTK ke eKinerja BKN, API eKinerja ke aplikasi TPP Pemkot Balikpapan, dan permasalahan lainnya yang muncul dikarenakan perubahan sistem; 2. Melakukan Sosialisasi langsung terkait Kinerja ke OPD; 3. Melakukan penyelesaian Disparitas Data Kinerja; 4. Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait kinerja secara rutin baik internal maupun melibatkan pimpinan tinggi OPD; 5. Membuat Surat Sekretaris Daerah ke Kepala BKN terkait Perubahan Jadwal Pengaliran	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
								data dari Ruang GTK ke e-Kinerja BKN; 6. Membuat Surat Sekretaris Daerah setiap Awal Tahun dan Akhir tahun kepada seluruh Kepala OPD perihal penyelesaian SKP di e-Kinerja BKN; 7. Membuat Surat Sekretaris Daerah secara rutin hasil monitoring penyelesaian SKP secara periodik bulanan; 8. Menghadiri/mengikuti zoom meeting yang dilaksanakan oleh BKN dan Kemendikdasmen; 9. Mentoring dan Coaching Clinic terkait pengisian dan permasalahan SKP baik untuk Tenaga Teknis maupun Guru; 10. Melakukan pengecekan terhadap data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan guna memastikan konsistensi dan mencegah terjadinya disparitas data SKP pada tahun berikutnya.	
								Dimensi Disiplin:	

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
								1. Melakukan monitoring tingkat kehadiran ASN setiap bulannya; 2. Menyusun draft kebijakan disiplin ASN; 3. Melakukan proses pembinaan atas dugaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Melakukan Sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan Disiplin ASN.	
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	88.00	88.02	100.02 %	Komitmen pimpinan serta monitoring evaluasi secara rutin dan berkala terhadap Penerapan SAKIP di BKPSDM Kota Balikpapan.	1. Pohon kinerja BKPSDM digunakan dalam perencanaan kinerja tahun 2025. Pohon kinerja sudah digunakan dalam perencanaan kinerja SKP dari Ess II sampai dengan staf/pelaksana. Sudah disusun crosscutting antar bidang maupun antar PD berdasarkan pohon kinerja. 2. Sudah disusun rencana aksi 2025 untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja	1. Peningkatan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal AKIP BKPSDM. 2. Peningkatan koordinasi internal terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal kinerja.

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sa tu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9	10
								2025. 3. Sudah dilakukan penginputan SKP yang berisi target kinerja dan realisasi kinerja beserta evidence pendukungnya pada aplikasi e kinerja BKN mulai dari Ess II sampai dengan staf/ pelaksana. 4. Pemanfaatan aplikasi SIMPEG untuk pelayanan kepegawaian berbasis digital dan terintegrasi terus dilaksanakan.	

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian) Kinerja

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal.

Meskipun Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 menuju Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029, tidak terdapat perbedaan strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan strategis BKPSDM dan hanya terdapat penambahan indikator kinerja pada perjanjian kinerja di periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada masa transisi perencanaan tersebut bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam pencapaian kinerja BKPSDM tahun 2025. Atas dasar hal tersebut, maka analisis disusun dengan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 27. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
1				Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Indeks Sistem Merit				80	80	100
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	98.36	98	99.63
		Indeks NSPK Manajemen ASN						Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi,	89.16	96	107.67

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
								Kualifikasi dan Kinerja			
								Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	1.91	0	0
								Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	80	80	100
							Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100	100	100

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
								Persentase Kualitas Data ASN	100	100	100
								Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	100	100	100
							Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	88.74	91	102,55
								Persentase Pengusulan kenaikan	100	86	86

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
								pangkat tepat waktu			
							Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	28.68	6	20,92
								Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0.271	1	369
								Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	80	60	75
							Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh	9.65	0	0

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
								penghargaan			
								Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5.88	23,07	0
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	18.95	35	184,7

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
							Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	17.02	23	135,14
							Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	23.3	60,04	257,68
2	Meningkatnya	Nilai SAKIP		Meningkatnya	Nilai AKIP		PROGRAM	Indeks	83	85,96	103,57

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan		Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	OPD		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.25	88,02	97,53
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83	85,39	102,88
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	83	86	103,61

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
							Perangkat Daerah	Daerah			
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83	85,96	103,57
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	85,5	103,01
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	83	85,82	103,4

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	2	3	4	8	9	10	11	12
								Daerah			
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	85,96	103,57

Sumber: BKPSDM 2025

Keterangan : Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra [nama perangkat daerah] Tahun 2021-2026 menuju Renstra [nama perangkat daerah] Tahun 2025-2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

1. Sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 100,24 % melalui Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia. Kedua program ini mendukung pencapaian kinerja meningkatkan profesionalitas ASN dengan hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualifikasi pendidikan melalui fasilitasi tugas belajar yang terdiri dari 15 orang yang mengikuti paaket B dan C, 3 orang Mahasiswa S3, 10 orang mahasiswa S2 dan 23 orang mahasiswa S1 orang dengan menggunakan dana APBD Kota Balikpapan. Selain tugas belajar yang bersumber dari dana APBD maupun mandiri, juga diberikan fasilitasi dalam pencantuman gelar akademik yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ASN baik secara manajerial, teknis dan sosio kultural yang dibutuhkan dalam jabatan ASN terkait. Pendidikan dan pelatihan di Kota Balikpapan juga dilakukan secara klasikal dan non klasikal, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi isu utama yang menjadi kendala dalam peningkatan kompetensi ASN. Pada tahun 2025, untuk pengembangan kompetensi manajerial telah dilaksanakan orientasi P3K, pelatihan dasar CPNS, latihan kepemimpinan tingkat jabatan pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama, pelatihan dasar fungsional (pembentukan)/ penjenjangan, uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi teknis umum di tahun 2025 dilaksanakan melalui pelatihan pelayanan publik, bimbingan teknis *capacity building* bagi jabatan

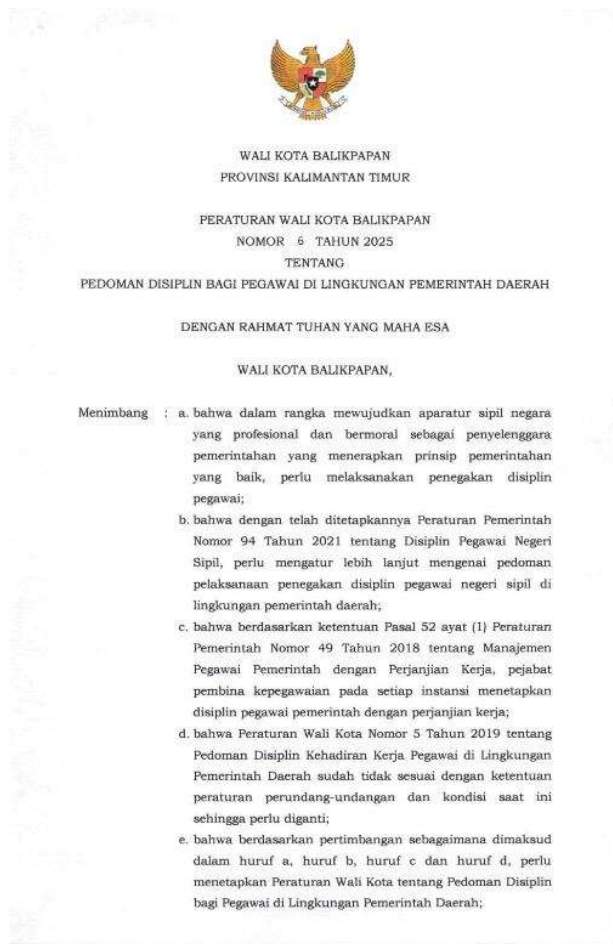
administrator dan pimpinan tinggi pratama, workshop manajemen talenta ASN, pelatihan manajemen ASN, pelatihan kepomongprajaan camat, pelatihan PBJ, pelatihan penyusunan program /perencanaan perangkat daerah, pelatihan bahasa inggris dan pelatihan SPBE.

Gambar 7. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Teknis umum Tahun 2025



Sumber Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Balikpapan

- c. Peningkatan kinerja melalui meningkatnya penilaian kinerja ASN yaitu penilaian SKP ASN yang pada tahun 2025 ini menggunakan aplikasi e kinerja BKN. Penilaian kinerja melalui aplikasi tersebut telah dilaksanakan per bulan dan dijadikan dasar dalam pembayaran tambahan penghasilan ASN Pemerintah Kota Balikpapan. Pada dimensi ini ASN dengan predikat kinerja sangat baik mencapai 648 ASN dan 7.924 ASN yang memiliki predikat kinerja baik dari 8.682 ASN . Hal ini mendukung pencapaian nilai pada dimensi kinerja IP ASN kota Balikpapan.



Sumber Bidang Mutasi BKPSDM

2. Sasaran strategis kedua yaitu yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi BKPSDM kemudian dilakukan review menjadi meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP BKPSDM Kota Balikpapan telah mencapai kinerja 100,02 %. Sasaran strategis ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini berisikan kegiatan rutin yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan seperti pembayaran gaji dan tunjangan, penyediaan logistik kantor berupa makan minum rapat serta alat tulis kantor

serta kegiatan pemeliharaan peralatan mesin kantor yang dimiliki BKPSDM.

Gambar 10. Kegiatan SAKIP BKPSDM dan Penerimaan Penghargaan Walikota Award tahun 2025



3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 BKPSDM maupun Renstra BKPSDM 2025-2029 Kota Balikpapan tidak terlepas dari adanya dukungan

sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) BKPSDM Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 95 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kota Balikpapan hanya didukung oleh 62 orang ASN

Tabel 28. Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) BKPSDM Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	L	P
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0
2	Sekretaris	0	1
3	Kepala Bidang Mutasi	0	1
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara	0	1
5	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	1	0
6	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	0	1
7	Kepala Sub Bagian Umum	0	1
8	Assessor SDM Madya	0	1
9	Asesor SDMA Muda	0	3
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	1	0
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	2	1
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	2	0
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama (P3K)	5	7
14	Pengelola Kepegawaian	0	0
15	Pengolah Data	0	0

No	Jabatan	L	P
16	Assessor SDMA Pertama	1	1
17	Asesor SDMA (CPNS)	0	2
18	Penyusun Data Dan Informasi	0	0
19	Verifikator Keuangan	0	0
20	Analisis Kepegawaian Pertama	0	0
21	Pranata Komputer Pertama	1	0
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan / Mahir	1	0
23	Pranata Komputer Ahli Pertama (P3K)	0	1
24	Pranata SDMA Mahir	1	1
25	Pengadministrasian Kepegawaian	0	0
26	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	0	0
27	Pengolah Data dan Informasi	0	1
28	Pengadministrasian Umum	0	0
29	Pengadministrasian Perencanaan Dan Program	0	0
30	Pengadministrasian Keuangan	0	0
31	Penata Laksana Barang (CPNS)	1	0
32	Penelaah Teknis Kebijakan	3	5
33	Pengadministrasian Perkantoran	8	5
34	Pengelola Layanan Operasional (P3K)	0	1
35	Non ASN	0	0
Jumlah		28	34

Sumber : SIMPEG Kota Balikpapan

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 29. Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKPSDM Menurut Tingkat Pendidikan

	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
	S3	0	0
	S2	0	6
	D 4/ S1	71	39
	D3	13	4
	D2	0	0
	D1	0	0
	SLTA	11	13
	SLTP	0	0
	SD	0	0

		95	62
--	--	----	----

Sumber: SIMPEG Kota Balikpapan

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada BKPSDM Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 39 orang atau 62,90 %, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 13 orang atau 20,97 %, pendidikan D3 berjumlah 4 orang atau 6,45%, dan S2 berjumlah 6 orang atau 9,68%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, BKPSDM Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja BKPSDM secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada BKPSDM Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BKPSDM Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Sarana Prasarana BKPSDM Kota Balikpapan

N o	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Ket
1	Gedung Bangunan	...	Baik			Digunakan untuk pelayanan Operasional

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
2		...	Rusak			Dalam Proses perbaikan
3	Kendaraan Dinas	7	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan Operasional
4		9	Rusak		√	Dalam Proses perbaikan
5	Peralatan Kantor	466	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan Operasional
6		67	Rusak		√	Dalam Proses perbaikan
7	Aset Tak Berwujud	16	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan Operasional
		2	Rusak		√	Dalam Proses perbaikan

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh BKPSDM berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan

secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki BKPSDM tahun 2025. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E: Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi: Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

Tabel 31. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Indeks Sistem Merit	Indeks	· Bidang Mutasi · Bidang Pendidikan dan Pelatihan · Bidang Pembinaan dan Informasi ASN	0.69	0.68	98.55	26,604,931,522.00	22,486,010,310.00	84.52	14,24	Indikator kinerja tujuan, yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasar Renstra 2025-2029
2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	· Bidang Mutasi · Bidang Pendidikan dan Pelatihan	80	80.19	100.24	10,244,452,868.00	8,507,606,120.00	83.05	17,15	Indikator kinerja sasaran strategis, yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasar Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029
3		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	· Bidang Mutasi · Bidang Pendidikan dan	74	72.68	98.22	10,244,452,868.00	8,507,606,120.00	83.05	15,45	Indikator kinerja NSPK yang terdapat pada Perjanjian

Laporan Kinerja BKPSDM 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan · Bidang Pembinaan dan Informasi ASN								Kinerja Perubahan berdasar Renstra 2021- 2026
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	Sekretariat	88	88.02	100.02	16,360,478,654.00	13,978,404,190.00	85.44	14,58	Indikator kinerja sasaran strategis, yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasar Renstra 2021- 2026 dan Renstra 2025- 2029

Sumber : BKPSDM 2025

- Keterangan :
1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra [nama perangkat daerah] Tahun 2021-2026 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
 2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
 3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Berdasarkan tabel 30. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran BKPSDM Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang bersumber dari Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029 diketahui terdapat 2 (dua) indikator yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal BKPSDM tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja BKPSDM Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra BKPSDM Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan BKPSDM dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 (satu) indikator kinerja yang mengacu dari Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

4. Adanya perubahan peraturan/ kebijakan dari instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan penilaian capaian indikator kinerja

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran BKPSDM Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sub bab Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan BKPSDM Kota Balikpapan yang diukur atas realisasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp. 26.604.931.522,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.486.010.310,00. dengan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 84,52%. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu	Anggaran Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,360,478,654.00	13,978,404,190.00	85.44
5.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13,143,421,000.00	11,194,112,601.00	85.17
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,143,421,000.00	11,194,112,601.00	85.17
5.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	881,588,000.00	800,059,668.00	90.75
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	126,588,000.00	105,000,000.00	82.95
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	755,000,000.00	695,059,668.00	92.06
5.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1,436,729,104.00	1,316,265,256.00	91.62
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646,201,619.00	616,235,544.00	95.36
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	446,675,610.00	376,826,024.00	84.36
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,682,700.00	45,398,052.00	91.38
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294,169,175.00	277,805,636.00	94.44
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553,200,000.00	434,500,000.00	78.54
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	553,200,000.00	434,500,000.00	78.54
5.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	35,927,000.00	27,992,600.00	77.92

No	Uraian	Pagu	Anggaran Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	PEMERINTAHAN DAERAH			
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,355,000.00	5,032,000.00	60.23
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,572,000.00	22,960,600.00	83.28
5.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	309,613,550.00	205,474,065.00	66.36
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201,480,000.00	136,650,636.00	67.82
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,986,100.00	11,809,929.00	32.82
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,147,450.00	57,013,500.00	79.02
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,619,100,755.00	3,835,876,080.00	83.04
5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	2,229,540,625.00	2,015,153,211.00	90.38
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2,608,010.00	1,969,375.00	75.51
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	696,373,375.00	564,542,526.00	81.07
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10,000,000.00	9,720,116.00	97.2

No	Uraian	Pagu	Anggaran Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,009,945,570.00	962,960,947.00	95.35
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	204,074,890.00	197,481,880.00	96.77
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	306,538,780.00	278,478,367.00	90.85
5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	515,364,720.00	360,048,173.00	69.86
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	36,675,050.00	32,527,042.00	88.69
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,499,770.00	26,423,302.00	96.09
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	451,189,900.00	301,097,829.00	66.73
5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1,629,900,105.00	1,290,658,938.00	79.19
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	537,531,685.00	456,219,661.00	84.87
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1,011,608,420.00	796,458,184.00	78.73
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	80,760,000.00	37,981,093.00	47.03
5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	244,295,305.00	170,015,758.00	69.59
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32,295,920.00	19,552,860.00	60.54
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	31,000,000.00	2,570,000.00	8.29
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	50,000,000.00	48,793,909.00	97.59
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	51,999,575.00	33,769,707.00	64.94
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43,999,810.00	30,580,282.00	69.5
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	35,000,000.00	34,749,000.00	99.28
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,625,352,113.00	4,671,730,040.00	83.05

No	Uraian	Pagu	Anggaran Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
5.04.02.2.01	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	3,824,392,969.00	3,216,875,931.00	84.11
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3,815,477,509.00	3,209,208,411.00	84.11
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	8,915,460.00	7,667,520.00	86
5.04.02.2.02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1,800,959,144.00	1,454,854,109.00	80.78
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,800,959,144.00	1,454,854,109.00	80.78
		26,604,931,522.00	22,486,010,310.00	84,52%

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja BKPSDM ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan BKPSDM Kota Balikpapan. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja masa transisi pelaksanaan Renstra BKPSDM periode 2021-2026 dan Renstra BKPSDM periode 2025-2029.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada laporan kinerja ini menunjukkan target kinerja di tahun 2025 ada yang terlampaui dan juga ada yang belum terlampaui.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BKPSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BKPSDM. Akhirnya, BKPSDM berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, modern dalam bingkai madinatul iman.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN